



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai dapat diselesaikan.

Dalam proses penyusunannya senantiasa berupaya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia N0. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berbagai tugas dan fungsi yang dijalankan, dinas PUPR terus berupaya meningkatkan kehandalan infrastruktur demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Manggarai. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, tahun 2019 dinas PUPR didukung 82 orang ASN dalam melaksanakan 9 program strategis dan 4 program pendukung.

Seluruh hasil kegiatan dan kerja keras dinas PUPR selama tahun 2019 dituangkan kedalam laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai yaitu laporan atas penggunaan anggaran yang meliputi pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian kinerja dari 7 sasaran strategis dinas PUPR Tahun 2019 adalah 101,30%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 pencapaian ini lebih kecil. Hal ini disebabkan tahun 2019 ada beberapa paket pekerjaan yang tidak maksimal penyerapannya karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan gagal kontrak.

Namun berbagai pencapaian tahun 2019 merupakan upaya seluruh jajaran dinas PUPR Kabupaten Manggarai yang bekerja sesuai bidang tugasnya masing-masing demi tercapainya tujuan manggarai yang maju, makmur, sejahtera, adil dan merata dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

Ungkapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang dengan upayanya masing-masing telah membantu dinas PUPR mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang memberi kontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Akhirnya kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai khususnya dan Pemerintah Kabupaten Manggarai pada umumnya.

Ruteng, Januari 2020



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK DAN LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MANGGARAI	2
1.3. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021.....	6
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA	10
2.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2018.....	12
2.4 PERJANJIAN KINERJA 2018.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 PENUGUKURAN CAPAIAN KINERJA	18
3.2 EVALUASI DAN ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.3 REALISASI ANGGARAN.....	37
BAB IV PENUTUP.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	8
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama	11
Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2019	12
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2019	14
Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2019	19
Tabel 3.2. Data Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2019	22
Tabel 3.3. Jumlah Jembatan Tahun 2016-2019	27
Tabel 3.4. Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran TA. 2019	38

DAFTAR GRAFIK DAN DAFTAR LAMPIRAN

Grafik 1.1	Panjang jalan dalam kondisi baik	22
Grafik 1.2	Jumlah Jembatan kondisi baik	26
Grafik 1.3	Prosentase penduduk terlayani air minum bersih	32
Lampiran 1	PK 2019	
Lampiran 2	Pengukuran Kinerja 2019	
Lampiran 3	Data jalan	
Lampiran 4	Data Irigasi	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dari setiap instansi pemerintah sebagaimana yang dimanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP. Laporan akuntabilitas juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai akuntabilitas kinerja yang baik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai telah melakukan berbagai pembenahan yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja dinas PUPR demi terwujudnya tujuan dan sasaran Dinas PUPR khususnya dan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Manggarai.

Dalam upaya mewujudkan visi misi, dinas PUPR juga menghadapi beberapa hambatan dan kendala yang mengakibatkan tidak maksimalnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Misalnya adalah rendahnya tingkat produktivitas ekonomi masyarakat sebagai akibat dari belum maksimalnya ketersediaan prasarana jaringan jalan yang mendukung sektor produksi dan distribusi hasil-hasil pertanian dan perkebunan. Pemenuhan pelayanan air minum bersih baik untuk irigasi maupun untuk kebutuhan sehari-hari menjadi masalah urgen yang terjadi.

Dinas PUPR sesuai dengan fungsinya mengangkat beberapa isu strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat yaitu pemenuhan pelayanan dasar terutama air bersih untuk minum dan air untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk irigasi; Menurunnya debit air dan kerusakan pada sumber air yang berdampak pada masih kurangnya cakupan air minum bersih perkotaan dan pedesaan; Penguatan pusat pertumbuhan wilayah dan pembangunan lingkungan perkotaan dan pedesaan; Peningkatan konektivitas; Peningkatan kapasitas dan kemantapan jalan serta penyediaan sarana prasarana dasar jalan; Sinkronisasi lintas sektoral terutama untuk mendukung sektor pertanian terkait irigasi dan luas daerah irigasi; serta Pemanfaatan ruang termasuk didalamnya implementasi IMB dan SLF.

Uraian tentang jawaban atas isu strategis tersebut dituangkan dalam Laporan Kinerja ini. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dijelaskan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Laporan Kinerja dimaksud berisi uraian singkat organisasi terkait tugas dan fungsi; Rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan, capaian kinerja dan evaluasi serta analisis pencapaian kinerja.

Sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar, mempunyai tugas untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan di bidang infrastruktur menyusun laporan kinerja tahunan.

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai memperhatikan keseimbangan berbagai aspek lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel. Sedangkan Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai selama tahun 2019 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2019 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*continuing improvement*). Berdasarkan apa yang diuraikan dalam laporan kinerja ini, diharapkan akan memberikan umpan balik untuk mencari solusi terbaik bagi masalah yang ada dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan. Upaya dimaksud hendaknya merupakan usaha-usaha berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan baik proses maupun cara kerja demi peningkatan pelayanan masyarakat yang lebih baik lagi.

1.2 GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MANGGARAI

- Dasar hukum berdirinya organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai.

- Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai secara umum tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Sumber Daya Air dan Irigasi, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Teknologi Jasa Konstruksi, serta Kesekretariatan berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan;

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Sekretariat;
- b. Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Air;
- c. Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Bina Marga;
- d. Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Cipta Karya;
- e. Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Penataan Ruang;
- f. Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Teknologi Jasa Konstruksi;
- g. Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Jabatan Fungsional;
- h. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

Secara rinci Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2019**

1.3 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2018 berpedoman pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian disajikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum perlunya penyusunan laporan kinerja, gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, isu strategis dan sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2019 meliputi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2016 - 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019, Rencana Kinerja Tahunan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2019.

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II PERENCANAAN

KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2016 - 2021

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016 - 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai sesuai Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 dan tetap berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021 untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.

Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2019, berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Dalam rangka mendukung Misi 1 (satu) dan Misi 4 (empat) RPJMD Kabupaten Manggarai 2016-2021 yakni (misi 1) meningkatkan perekonomian manggarai dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia didukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan misi (4) mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan ekosistem dan berbasis tata ruang, maka Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan tersebut, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang infrastruktur jalan, jembatan, saluran drainase/gorong-gorong, air minum, normalisasi saluran sungai, jaringan irigasi, pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya, jalan lingkungan, pembinaan jasa konstruksi dan penataan ruang.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai ini merupakan revisi Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai

periode 2016-2021 sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati Manggarai Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai.

Secara ringkas substansi Renstra, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai dapat di ilustrasikan sebagai berikut:

VISI

Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal dan berbasis Tata Ruang Untuk Mendukung Manggarai Yang Maju, Makmur, Sejahtera, Adil dan Merata, dan Diridhoi Tuhan Yang Maha Esa

MISI:

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan dari pembangunan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air;
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan;
5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang;
6. Menerapkan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan permukiman.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang jangka menengah adalah:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
I	Meningkatnya keandalan infrastruktur jalan dan jembatan	Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pusat pelayanan publik lainnya	1). Meningkatkan kemantapan jalan melalui peningkatan kapasitas dan struktur jalan dan pemeliharaan jalan 2).Peningkatan Fasilitas Kelengkapan Jalan dan Jembatan 3).Mempertahankan kemantapan jalan dan jembatan melalui pemeliharaan jalan dan jembatan	1) Penyusunan program dan anggaran yang sesuai dengan rencana penyelenggaraan jalan yang berkelanjutan 2) Melaksanakan pembangunan jalan melalui peningkatan kapasitas dan struktur jalan 3) Penguatan Kapasitas Kelembagaan UPR 4) Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
II	Meningkatnya ketersediaan debit air untuk kebutuhan masyarakat	1. Meningkatkan cakupan pelayanan irigasi untuk pertanian rakyat 2. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana air bersih	1. Konservasi lingkungan air 2. Perlindungan sumber mata air 3. Tata kelola air minum dan air irigasi 4. Pemberdayaan masyarakat 5.Peningkatan pembangunan	1. Pembangunan embung, sumur resapan, lubang resapan biopori) 2.Pengendalian exploitasi pemanfaatan air 3. Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Air Irigasi, Embung dan Pompanisasi 4. Pengaturan tata kelola sumber air minum dan air irigasi 5. Penyusunan Dokumen Rencana

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			sarana prasaran air bersih	Induk Sistem Penyediaan Air Minum Dan Rencana Detail 6. Pembangunan Dan Perluasan Jaringan Air Minum 7. Dukungan Kebijakan Nasional 100-0-100 (100% Akses Air Minum, 0% Daerah Kumuh, 100% Sanitasi)
III	Meningkatnya keamanan DAS di 12 Kecamatan	Berkurangnya Resiko Daya Rusak Air Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) pada 12 kecamatan	Penyelamatan Kawasan Budidaya (Permukiman, Pertanian) dari Bangunan Sepanjang Daerah Aliran Sungai	1. Pengamanan Daerah Aliran Sungai (DAS) Peningkatan Jaringan Irigasi Primer, Sekunder, Tersier 2. Normalisasi Daerah Aliran Sungai(DAS) 3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat
IV	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastuktur berbasis tata ruang	Meningkatnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	1. Optimaslisai penyebarluasan informasi, perencanaan dan pengendalian tata ruang 2. Pemanfaatan ruang sesuai KLHS, RTRW/RDTR dan Neraca Lingkungan	1. Meningkatkan koordinasi para pemangku kepentingan lintas sektor 2. Penyusunan dokumen RDTR dan penetapan Perda RDTR 3. Kajian Lingkungan Hidup Strategid dan Neraca Lingkungan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				4. Pembentukan Tim Penertiban Perda Bangunan Gedung dan Perda RDTR 5. Penengakan Aturan
VI	Penyediaan sanitasi permukiman	Meningkatnya kualitas sanitasi (drainase) permukiman perkotaan	Peningkatan Fasilitas Pendukung Jalan Utama Dalam Kota Ruteng	Pembangunan Trotoar, Drainase Jalan Utama Dalam Kota Ruteng

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai serta RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2016-2021. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai tahun 2016-2021.

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA

SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 TA : 2019

No	Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya aksesibilitas jalan yang mendukung perekonomian dan pelayanan publik lainnya	1.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Panjang jalan kondisi baik	Bidang Bina Marga
		1.2 Prosentase Jembatan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jalan seluruhnya}}{\text{Jumlah jembatan dalam kondisi baik}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah jembatan}}{\text{Jumlah jembatan}} \times 100$	Bidang Bina Marga
2	Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk pertanian rakyat	2.1 Rasio Jaringan Irigasi	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas Lahan Budidaya}} \times 100$	Bidang Sumber Daya Air
		2.2 Prosentase Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100$	Bidang Sumber Daya Air
3	Meningkatnya Jumlah Penduduk Yang Terlayani Air minum Bersih	3.1 Prosentase Jumlah penduduk yang terlayani dengan air minum bersih	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani dengan air minum bersih}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$	Bidang Cipta Karya
4	Meningkatnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	4.1 Prosentase Kecamatan yang memiliki Dokumen RDTR	$\frac{\text{Jumlah kecamatan yg memiliki dokumen RDTR}}{\text{Jumlah kecamatan di daerah kabupaten}} \times 100$	Bidang Tata Ruang

2.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Setiap sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai telah menetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2019

NO 1	SASARAN 2	INDIKATOR 3	TARGET 4
1.	Meningkatnya aksesibilitas jalan yang mendukung perekonomian dan pelayanan publik lainnya	1.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 1.2. Panjang jalan yang dilalui roda 4 1.3. Peningkatan jenis konstruksi jalan - Telford - Lapen - HRS (Hotmix) 1.1 Jumlah jembatan dalam kondisi baik	64,32% 92,62% 6,05 % 81,41 % 13,21 % 281 unit
2.	Meningkatnya kualitas sanitasi (drainase) permukiman	2.1 Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	100%
3.	Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk pertanian rakyat	3.1. Rasio jaringan irigasi 3.2. Prosentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	73,93 % 48,47%
4.	Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani air minum bersih	4.1 Prosentase jumlah penduduk yang terlayani dengan air minum bersih	94,80%
5.	Berkurangnya resiko daya rusak air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) pada 12 kecamatan	5.1 Prosentase panjang DAS yang ternormaisasi	22,50%
6.	Meningkatnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	6.1 Prosentase kecamatan yang memiliki dokumen RDTR	91,67%
7.	Meningkatnya pengendalian jasa konstruksi	7.1 Prosentase jasa konstruksi yang diawasi/ Persentase layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	100%

2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan atau *reward* dan sanksi atau *punishment*.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai telah menetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4.1
PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya aksesibilitas jalan yang mendukung perekonomian dan pelayanan publik lainnya	1.4. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 1.5. Panjang jalan yang dilalui roda 4 1.6. Peningkatan jenis konstruksi jalan - Telford - Lapen - HRS (Hotmix) 1.2 Jumlah jembatan dalam kondisi baik	64,32% 92,62% 6,05 % 81,41 % 13,21 % 281 unit
2.	Meningkatnya kualitas sanitasi (drainase) permukiman	2.2 Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	100%
3.	Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk pertanian rakyat	3.3. Rasio jaringan irigasi 3.4. Prosentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	73,93 % 48,47%
4.	Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani air minum bersih	4.2 Prosentase jumlah penduduk yang terlayani dengan air minum bersih	94,80%
5.	Berkurangnya resiko daya rusak air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) pada 12 kecamatan	5.1 Prosentase panjang DAS yang ternormaisasi	22,50%
6.	Meningkatnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	6.2 Prosentase kecamatan yang memiliki dokumen RDTR	91,67%
7.	Meningkatnya pengendalian jasa konstruksi	7.2 Prosentase jasa konstruksi yang diawasi/ Persentase layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	100%

PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
I	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	88.459.967.500,-
II	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	15.947.507.500,-
III	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	8.231.365.024,-
IV	Program Pengembangan dan Pengeloaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	36.325.175.134,-
V	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	3.515.445.600,-
VI	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	5.797.342.500,-
VII	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	100.000.000,-
VIII	Program Perencanaan Tata Ruang	1.339.055.000,-
IX	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	340.315.000,-
	PROGRAM PENDUKUNG:	
X	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	831.790.000,-
XI	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	967.310.000,-
XII	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	42.000.000,-
XIII	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000,-
XIV	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1.056.009.960,-
	TOTAL	162.958.283.218

Sampai dengan akhir tahun 2019 Perjanjian Kinerja ini seharusnya mengalami perubahan terkait dengan pagu anggaran, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4.1
PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya aksesibilitas jalan yang mendukung perekonomian dan pelayanan publik lainnya	1.7. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 1.8. Panjang jalan yang dilalui roda 4 1.9. Peningkatan jenis konstruksi jalan - Telford - Lapen - HRS (Hotmix) 1.3 Jumlah jembatan dalam kondisi baik	64,32% 92,62% 6,05 % 81,41 % 13,21 % 281 unit
2.	Meningkatnya kualitas sanitasi (drainase) permukiman	2.3 Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	100%
3.	Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk pertanian rakyat	3.5. Rasio jaringan irigasi 3.6. Prosentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	73,93 % 48,47%
4.	Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani air minum bersih	4.3 Prosentase jumlah penduduk yang terlayani dengan air minum bersih	94,80%
5.	Berkurangnya resiko daya rusak air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) pada 12 kecamatan	5.1 Prosentase panjang DAS yang ternormaisasi	22,50%
6.	Meningkatnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	6.3 Prosentase kecamatan yang memiliki dokumen RDTR	91,67%
7.	Meningkatnya pengendalian jasa konstruksi	7.3 Prosentase jasa konstruksi yang diawasi/ Persentase layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	100%

PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
I	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	86.175.169.834,-
II	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	16.415.128.250,-
III	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	8.002.284.000,-
IV	Program Pengembangan dan Pengeloaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	36.081.787.817,-
V	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	2.651.345.600,-
VI	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	5.843.374.500,-
VII	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	100.000.000,-
VIII	Program Perencanaan Tata Ruang	1.000.292.800,-
IX	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	340.315.000,-
	Jumlah Program Strategis (9 program)	155.609.697.801,-
	PROGRAM PENDUKUNG:	
X	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	961.817.500,-
XI	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	847.167.000,-
XII	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,-
XIII	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000,-
XIV	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1.126.609.960,-
	Jumlah Program Pendukung (4 program)	2.940.594.460,-
	TOTAL (13 program)	158.550.292.261,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai adalah perwujudan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran strategis. Secara umum sasaran strategis dinas PUPR adalah meningkatkan keandalan infrastruktur dalam rangka mewujudkan layanan infrastruktur dasar, konektivitas, ketahanan pangan dan ketahanan air yang semuanya diselenggarakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran strategis ini akan terwujud dengan adanya hasil/outcome dari program kegiatan yang dilaksanakan dinas PUPR yang tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun 2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan/memanfaatkan data kinerja, untuk itu perlu dibangun system informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan system informasi yang ada. Pengumpulan data kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, dilakukan dengan menyebarkan format Pengukuran Kinerja kepada setiap Sub Bagian dan Seksi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai serta melakukan konfirmasi secara langsung kepada Sub Bagian dan Seksi tersebut. Selain itu dalam rangka memperoleh data yang akurat dinas PUPR juga berkoordinasi dengan instansi lain yang memiliki keterkaitan data dan informasi.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2019 untuk mencapai 7 (tujuh) sasaran.

Pada tahun 2019 hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai adalah **101,30%**. Keberhasilan ini disumbangkan oleh capaian dari 7 (tujuh) sasaran strategis Dinas. Sedangkan program kegiatan pendukung lainnya mencapai target yaitu dengan capaian kinerja 100%. Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Manggarai Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya aksesibilitas jalan yang mendukung perekonomian dan pelayanan publik lainnya	1.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 1.2. Panjang jalan yang dilalui roda 4 1.3. Peningkatan jenis konstruksi jalan - Telford - Lapen - HRS (Hotmix) 1.4. Jumlah jembatan dalam kondisi baik	64,32% 92,62% 6,05 % 81,41 % 13,21 % 281 unit	58,46% 90,93% 14,04% 62,95% 13,94% 267 unit	91,22 98,18 232,11 77,33 105,52 95,02
2.	Meningkatnya kualitas sanitasi (drainase) permukiman	2.4 Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	100%	94,84%	94,84
3.	Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk pertanian rakyat	1.5. Rasio jaringan irigasi 1.6. Prosentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	73,93 % 48,47%	77,75% 68,76%	105,17 141,87
4.	Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani air minum bersih	4.4 Prosentase jumlah penduduk yang terlayani dengan air minum bersih	94,80%	79,93%	84,31
5.	Berkurangnya resiko daya rusak air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) pada 12 kecamatan	5.1 Prosentase panjang DAS yang ternormaisasi	22,50%	21,57%	95,87
6.	Meningkatnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	7.4 Prosentase kecamatan yang memiliki dokumen RDTR	91,67%	41,67%	45,45
7.	Meningkatnya pengendalian jasa konstruksi	1.7. Prosentase jasa konstruksi yang diawasi/ Persentase layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	100%	50,48%	50,48
	Rata-rata capaian kinerja				101,34%

Capaian kinerja program dan kegiatan pendukung :

PROGRAM/KEGIATAN PENDUKUNG :				
NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal	100%	100%	100
		100%	100%	100,00
		100%	100%	100,00
		100%	100%	100,00
		100%	100%	100,00
		100%	100%	100,00
		100%	100%	100,00
		100%	100%	100,00
		100%	100%	100,00
		100%	100%	100,00
		100%	100%	100,00
		100%	100%	100,00
		100%	100%	100,00
NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
2	Terwujudnya Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur Yang Optimal	100%	100,00%	100,00
		100%	100%	100,00
		100%	100,00%	100,00
		100%	100,00%	100,00
		100%	100,00%	100,00
3	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	100%	100,00%	100,00
		100%	100,00%	100,00
4	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang optimal	100%	100,00%	100,00
		100%	100,00%	100,00
		100%	100,00%	100,00
	JUMLAH PROGRAM PENDUKUNG (4) DENGAN JUMLAH ANGGARAN		100	100
	TOTAL PROGRAM (13) DAN ANGGARAN	100,00	95,18	100,67

3.2 EVALUASI DAN ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA

Pencapaian kinerja sasaran Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya aksesibilitas jalan yang mendukung perekonomian dan pelayanan publik lainnya

Sasaran “Meningkatnya aksesibilitas jalan yang mendukung perekonomian dan pelayanan publik lainnya” dengan tiga indikator yaitu (1) proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik; (2) Panjang jalan yang dilalui roda empat; dan (3) prosentase jembatan dalam kondisi baik.

Indikator Kinerja	Sat.	Thn 2018		%	Thn 2019		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	61,37	56,73	92,43	64,32	58,46	90,89
Panjang jalan yang dilalui roda empat	%	84,46	90,34	106,96	92,62	90,92	98,16
Peningkatan jenis konstruksi jalan							
- Telford	%	7,42	15,47	208,49	6,05	14,04	232,11
- Lapen	%	75,31	62,896	83,52	81,41	62,95	77,33
- HRS	%	11,14	11,927	107,06	13,21	13,94	105,52
Jumlah jembatan dalam kondisi baik	%	91,72	261	104,97	281 unit	267 unit	95,02
RATA-RATA				117,24			116,48

Keberhasilan capaian dari indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik**

Panjang jalan kondisi baik merupakan capaian penanganan jalan baik melalui pekerjaan peningkatan struktur jalan maupun melalui rehabilitasi/pemeliharaan jalan. Kondisi akhir 2019 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 58,46% atau 971,60 km dari target yang ditetapkan 64,32% dengan tingkat capaian 90,89%. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dengan indikator yang sama dimana target sebesar 61,37%, realisasi sebesar 56,73% maka tingkat capaian tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 3,049%. Namun perlu dijelaskan, pada tahun 2019 terdapat pengurangan panjang jalan kabupaten akibat pengalihan status beberapa ruas jalan, sehingga kondisi akhir 2019 panjang jalan kewenangan Kabupaten Manggarai adalah

1.662,045 km. Dengan demikian capaian jalan dalam kondisi baik sampai tahun 2019 sebesar 58,46% atau sepanjang 971,60 km dari total panjang jalan 1.662,045 km.

Dalam hal ini capaian proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah **panjang jalan kondisi baik dibagi panjang jalan seluruhnya**

Tabel. 3.2. Data Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2019

Tahun	% Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Ket. (Total Panjang Jalan = 1.700,889 Km)
2015	56,56 (962,04 Km)	
2016	59,20 (1.006,87 Km)	
2017	54,32 (923,75 Km)	Panjang jalan kabupaten =1532,57 km dan jalan non status sepanjang 168,32km. Panjang jalan seluruhnya 1.700,89 km. Kondisi baik 923.90 km, kondisi sedang 121 km, kondisi rusak 463.24 km dan kondisi rusak berat sepanjang 192.74 km
2018	56,73(964,91 Km)	Panjang jalan kabupaten =1532,57 km dan jalan non status sepanjang 168,32km. Panjang jalan seluruhnya 1.700,89 km. Kondisi baik 964.99km, kondisi sedang 118.08km, kondisi rusak 453.58 km dan rusak berat 164.25km
2019	58,46 (971,60 Km)	Panjang jalan kabupaten =1.493,73 km dan jalan non status sepanjang 168,32km. Panjang jalan seluruhnya 1.662,045 km. Kondisi baik 971,60 km, kondisi sedang 110,01 km, kondisi rusak 196,80 km dan rusak berat 383,63 km

• Sumber: Dinas PUPR Kab. Manggarai Tahun 2019

Grafik.1.1.Panjang jalan dalam kondisi baik



- Panjang jalan yang dilalui roda empat

Pada tahun 2018 dari total jalan seluruh kabupaten Manggarai sepanjang 1700,89 km, yang dapat dilalui roda empat sepanjang 1536.64 km yang terdiri dari hotmix sepanjang 202.88 km, aspal sepanjang 1069.79 km dan kerikil 263.22 km.

Sampai akhir 2019 jalan yang dapat dilalui roda empat adalah sepanjang 1511,12km yang terdiri dari hotmix sepanjang 231,58 km, aspal sepanjang 1046,24 km dan kerikil 233,30 km.

Capaian ini diperoleh dengan rumus Jumlah panjang jalan yang dilalui roda empat (panjang jalan dengan jenis permukaan hotmix, aspal dan kerikil) dibagi panjang jalan seluruhnya

Jika dibandingkan dengan capaian jalan tahun 2018 1536,64 km terlihat capaian tahun 2019 sepanjang 1511,12 km mengalami penurunan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2019 terjadi pengalihan status beberapa ruas jalan kabupaten. Pengalihan ruas jalan tersebut mempengaruhi panjang jalan kabupaten pada masing-masing ruas jalan sesuai jenis konstruksinya masing-masing, yang tentunya mempengaruhi panjang ruas jalan kabupaten secara keseluruhan. Dengan demikian realisasi capaian indikator sasaran panjang jalan yang dilalui roda empat sampai tahun 2019 sebesar 90.93% dari target yang ditetapkan sebesar 92,62% dengan tingkat capaian 98,18 % tidak merupakan kemunduran dari capaian tahun 2018, tetapi akibat pengalihan status ruas jalan kabupaten. Capaian ini mencerminkan keberhasilan indikator sasaran panjang jalan yang dilalui roda empat dengan prosentase kenaikan 0,65 %.



Untuk mendukung dua indikator di atas, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 95.595.448.142,00 realisasi Rp. 90.437.196.292,00 atau 94,75%. Anggaran ini dimanfaatkan untuk Kegiatan Pembangunan Jalan, Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan serta kegiatan monitoring dan evaluasi.

- Peningkatan jenis konstruksi jalan

- Telford
- Lapen
- HRS/Hotmix

Capaian target penanganan jalan tahun 2019 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai menurut jenis konstruksi adalah Telford sepanjang 12,22 km; Lapen 62,42km dan HRS/Hotmix sepanjang 19,12km. Sampai dengan akhir 2019, data jalan menurut jenis konstruksi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Telford :

Kondisi panjang jalan telford sampai tahun 2019 adalah 233,30 km atau 14,04% dari total panjang jalan kewenangan pemerintah Kabupaten Manggarai 1.662,045km.

Capaian ini diperoleh dengan rumus panjang jalan telford dibagi panjang jalan seluruhnya dikali 100%. Atau dengan perhitungan :

$$\frac{233,30km}{1.662,045km} \times 100\% = 14,04\%$$

Jika dilihat dari target jalan telford pada tahun 2019 adalah 6,05 % dan capaian panjang jalan telford 14,04% maka tingkat capaian jalan telford tahun 2019 adalah 232,11% yang diperoleh dengan perhitungan :

$$\frac{14,04\%}{6,05\%} \times 100\% = 232,11\%$$

- Lapen :

Kondisi panjang jalan Lapen sampai tahun 2019 adalah 1.046,24km atau 62,95% dari total panjang jalan kewenangan pemerintah Kabupaten Manggarai 1.662,045km.

Capaian ini diperoleh dengan rumus panjang jalan jenis konstruksi lapen dibagi panjang jalan seluruhnya dikali 100%. Atau dengan perhitungan :

$$\frac{1.046,24\text{km}}{1.662,045\text{km}} \times 100\% = 62,95\%$$

Jika dilihat dari target jalan lapen pada tahun 2019 adalah 81,41 % dan capaian panjang jalan lapen 62,95% maka tingkat capaian jalan lapen tahun 2019 adalah 77,32% yang diperoleh dengan perhitungan :

$$\frac{62,95\%}{81,41\%} \times 100\% = 77,32\%$$

81,41%

- HRS/Hotmix : 231,58

Kondisi panjang jalan HRS/Hotmix sampai tahun 2019 adalah 231,58km atau 13,93% dari total panjang jalan kewenangan pemerintah Kabupaten Manggarai 1.662,045km.

Capaian ini diperoleh dengan rumus panjang jalan jenis konstruksi HRS/Hotmix dibagi panjang jalan seluruhnya dikali 100%. Atau dengan perhitungan :

$$\frac{231,58\text{km}}{1.662,045\text{km}} \times 100\% = 13,93\%$$

Jika dilihat dari target jalan jenis konstruksi HRS/Hotmix pada tahun 2019 adalah 13,21 % dan capaian panjang jalan HRS/Hotmix 13,93% maka tingkat capaian jalan HRS/Hotmix tahun 2019 adalah 105,48% yang diperoleh dengan perhitungan :

$$\frac{13,93\%}{13,21\%} \times 100\% = 105,48\%$$

13,21%

Untuk mendukung indikator di atas, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 80.956.810.142,00 realisasi Rp. 80.729.037.269,00 atau 99,72%. Anggaran ini dimanfaatkan untuk Kegiatan Pembangunan Jalan, dan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan serta kegiatan monitoring dan evaluasi.

Data kondisi jalan 2019 :

JENIS PERMUKAAN					
URAIAN		JALAN KABUPATEN	JLN DS	TOTAL	SATUAN
HRS	:	231,58	-	231,58	KM
LAPEN	:	974,17	72,07	1.046,24	KM
TELFORD	:	144,97	88,33	233,30	KM
TANAH	:	142,41	7,92	150,33	KM
TIDAK DIRINCI/RABAT	:	0,60	-	0,60	KM
TOTAL	:	1.493,73	168,32	1.662,045	KM
KONDISI PERMUKAAN					
URAIAN		JALAN KABUPATEN	JLN DS	TOTAL	SATUAN
BAIK	:	904,03	67,57	971,60	KM
SEDANG	:	107,61	2,40	110,01	KM
RUSAK	:	194,70	2,10	196,80	KM
RUSAK BERAT	:	287,38	96,25	383,63	KM
TOTAL	:	1.493,73	168,32	1.662,045	KM

- Jumlah Jembatan dalam kondisi baik

Data capaian jumlah jembatan dalam kondisi baik sampai tahun 2019 adalah 267 unit jembatan. Hingga akhir 2019 jumlah jembatan yang terbangun 274 unit dan hanya terdapat 7 unit yang rusak, yaitu 3 unit yang rusak berat dan 4 unit yang rusak ringan sedangkan jembatan yang kondisinya baik sejumlah 267 unit dengan capaian 95,02%.

Prosentase jembatan dalam kondisi baik dalam hal ini adalah jumlah jembatan dalam kondisi baik dibagi jumlah jembatan x 100%

Grafik 1.2



Tabel 3.3.
Jumlah Jembatan Tahun 2016-2019

No.	Tahun	Jumlah Jembatan	Ket
1.	2016	259	<ul style="list-style-type: none"> • Baik = 248 • Rusak =11
2.	2017	266	<ul style="list-style-type: none"> • Baik = 255 • Rusak =11
3.	2018	271	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi baik =261 • Rusak= 10
4.	2019	274	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi baik =267 • Rusak= 7

Untuk mendukung indikator ini, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.11.748.921.692,00 dengan realisasi Rp.11.393.746.617,00 atau 96,98%. Anggaran ini dimanfaatkan untuk Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Kegiatan Pemeliharaan Jembatan serta kegiatan monitoring dan evaluasi. Penyerapan anggaran sebesar 96,98% ini disebabkan karena pada tahun 2019 terdapat 2 pekerjaan jembatan yang tidak tuntas pekerjaannya sehingga penyerapan anggaran disesuaikan dengan realisasi fisik pekerjaan.

Tidak terserapnya anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran ini adalah pada tahun 2019 terdapat beberapa pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan berakhirnya masa kontrak (realisasi fisik tidak mencapai 100%) sehingga untuk penyerapannya disesuaikan realisasi fisik pekerjaan. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut disebabkan karena keterlambatan penyediaan alat/material karena kelalaian kontraktor. Untuk mengatasi persoalan ini beberapa langkah yang dilakukan dinas PUPR adalah membuat addendum kontrak untuk pemberian kesempatan/waktu selama 50 HK kepada kontraktor pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas dan dikenakan denda keterlambatan. Pemberian addendum ini didahului dengan:

1. Kontraktor membuat surat pernyataan sanggup melaksanakan sisa pekerjaan;
2. Kontraktor bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
3. Kontraktor membuat surat pernyataan tidak menuntut denda/bunga karena keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun berikutnya.;
4. Pembayaran sisa pekerjaan diusulkan di anggaran perubahan 2020.

Sasaran 2: Meningkatkan kualitas sanitasi (drainase) permukiman

Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai menetapkan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

- Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

Indikator Sasaran	Tahun 2018			Tahun 2019			Target 2020
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	100	100	100	100	94,84	94,84	100
Rata-rata				100			100

(Target yang ditetapkan dan realisasi capaian program merupakan target dan realisasi untuk tahun berkenan (2019)).

Tahun 2018 prosentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat mencapai 100% atau sepanjang 10 km dari target yang ditetapkan juga sepanjang 10 km dengan tingkat capaian 100%. Pencapaian ini merupakan hasil dari pelaksanaan pembangunan saluran drainase tahun 2018 saja. Pada tahun 2019 realisasi capaian pembangunan drainase adalah 9,178 km dari target 9,678 km dengan tingkat capaian 94,84%. Pencapaian ini juga merupakan capaian tahun berjalan (tahun 2019). Harapannya adalah pada tahun berikutnya kinerja untuk penanganan drainase akan lebih baik. Terutama pada kawasan padat penduduk dimana saluran drainase sudah dipenuhi tumpukan sampah, sedimen tanah, dan material lain yang mengakibatkan tersumbatnya aliran air, menimbulkan genangan air, aroma yang tidak sedap, yang mengganggu aktifitas sehari-hari. Diperlukan perhatian dan kerjasama dari masyarakat untuk bersama-sama pemerintah bekerja untuk menciptakan kota yang lebih bersih, dengan saluran drainase yang bebas genangan.

Untuk mendukung indikator ini, jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.8.002.284.000,00 dengan realisasi Rp.7.943.473.900,00 atau 96,98%.

Sasaran 3: Meningkatkan cakupan pelayanan irigasi untuk pertanian rakyat

Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk pertanian rakyat” dinas PUPR melaksanakan satu program dan satu kegiatan yang pencapaiannya diukur dengan menggunakan 2 indikator yaitu Rasio jaringan irigasi dan Prosentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik.

Analisis capaian indikator kinerja dari sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Rasio jaringan irigasi

Rasio jaringan irigasi yang dimaksudkan adalah bertambahnya cakupan pelayanan irigasi pertanian rakyat yang terlayani oleh air irigasi yang diperoleh dengan rumus :

$$\text{Rasio jaringan irigasi} = \frac{\text{Luas DI yg tertangani} \times 100}{\text{Luas seluruh DI}}$$

Luas Daerah Irigasi yang tertangani jaringan irigasi sampai dengan tahun 2019 adalah 15.121 ha dari Luas Daerah irigasi kewenangan kabupaten adalah 19.833 ha. Sedangkan total panjang saluran ini yang tertangani sampai dengan tahun 2019 adalah 133.500m dari panjang saluran irigasi yang masuk dalam kewenangan kabupaten dan merupakan panjang seluruh saluran irigasi kewenangan kabupaten 399.148m.

Dengan demikian capaian rasio jaringan irigasi adalah sebesar 77,75% dihitung dengan rumus :

$$\frac{15.121 \text{ ha}}{19.833 \text{ ha}} \times 100\% = 77,75\%$$

Capaian kinerja ini dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

Indikator Sasaran	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Target 2020
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Rasio jaringan irigasi	65,84	61,26	93,04	73,93	77,75	105,17	80

Sedangkan rasio jaringan irigasi yang merupakan perbandingan antara panjang saluran irigasi terhadap luas lahan budidaya adalah sebesar 15,67 yang diperoleh dari rumus perhitungan **Panjang Saluran Irigasi dibagi Luas Lahan Budidaya** dimana panjang saluran irigasi 399.148 m dan luas lahan budidaya adalah 25.476 ha(luas lahan budidaya 2018,sumber Distan).

Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 dari target yang ditetapkan sebesar 58.57 %, terealisasi sebesar 56.76% dengan tingkat capaian 96.91%, pada tahun 2019 ada peningkatan bertambahnya cakupan pelayanan irigasi pertanian rakyat yang terlayani oleh air irigasi sebesar 13%.

- Prosentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Indikator Sasaran	Tahun 2018			Tahun 2019			Target 2020
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Prosentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	42.74	61.26	143.33	48,47	68,76	141,86	50

Prosentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi luas irigasi kabupaten} \times 100.$$

Sampai tahun 2018 Daerah Irigasi (D.I) yang tertangani dan dalam kondisi baik adalah seluas 13621 ha dari total luas D.I kewenangan kabupaten sebesar 22234 ha.

Dari tabel di atas dapat dilihat prosentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik mencapai 68,76% dari target yang ditetapkan 48,47% dengan tingkat capaian 141,86% dengan rumus :

$$\frac{13.638 \text{ ha}}{19.833 \text{ ha}} \times 100\% = 68,76\%$$



Capaian ini mencerminkan keberhasilan indikator sasaran prosentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah karena ketersediaan dana yang cukup. Tahun 2019 jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah Rp.15.820.267.484,00 dan terealisasi sebesar Rp. 15.654.392.475,00 (98,95%)

Apabila dikaitkan dengan target renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai dimana target pada tahun 2021 sebesar 54,44% dan capaian sampai tahun ini 68,76% maka untuk indikator ini sudah melebihi target renstra.

Sasaran 4: Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani air minum bersih

Capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani air minum bersih” pada tahun 2019 adalah sebesar 79,93%. Capaian ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018. Hal ini bisa terjadi karena pada tahun 2019 ketersediaan anggaran yang cukup besar terutama yang bersumber dari Dana DAK Fisik Bidang Air Minum TA. 2019, Kabupaten Manggarai mendapat alokasi sebesar Rp.13.599.999.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.12.415.482.856,00. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang dialokasi untuk mencapai sasaran ini adalah Rp.20.985.109.135,00, terealisasi Rp.20.279.553.652,00 (96,64%). Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai menjabarkan dalam 2 (dua) program dengan 1 (satu) indikator kinerja seperti terlihat pada tabel berikut ini:

No	Indikator Sasaran	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Target 2020
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1.	Prosentase jumlah penduduk yang terlayani air minum bersih	84,24	77,80	92,36	89,61	79,93	84,31	95

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa pada tahun 2019 capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani air minum bersih adalah 79,93% dengan perhitungan jumlah penduduk yang terlayani air minum bersih dibagi jumlah penduduk Kabupaten Manggarai tahun 2019, dengan rumus :

$$\text{Prosentase jumlah penduduk yang terlayani air minum bersih} = \frac{270.374}{338.264} \times 100\% = 79,93\%$$

Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai sebanyak 338.264 jiwa (*Data Dispenduk Capil*). Dari jumlah tersebut, yang berakses air minum sebanyak 270.374 jiwa. Jadi realisasi capaian indikator ini sebesar 79.93% dengan tingkat capaian 84,31% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 dengan indikator yang sama, dimana target sebesar 84.24% dan realisasi sebesar 77,80% sehingga capaiannya sebesar 92.36% maka capaian tahun 2019 sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Hal ini erat kaitannya dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai. Data tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Manggarai adalah 359.071 (*Data Dispenduk Capil*). Namun demikian secara keseluruhan jumlah penduduk yang terlayani air minum bersih di tahun 2019 semakin meningkat.

Grafik 1.3



Apabila dikaitkan dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai, dimana target pada tahun 2021 sebesar 95% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 79,93% maka target yang harus dicapai dalam dua

tahun ke depan sebesar 15,07%. Namun demikian pada tahun 2019 masih ada dua pekerjaan pembangunan air minum yang tidak terselesaikan sampai berakhirnya masa kontrak. Hal ini disebabkan karena pemindahan lokasi dari yang direncanakan sebelumnya sehingga harus melakukan addendum kontrak, perubahan desain, sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan yang dihadapi pada tahun 2019 antara lain:

1. Masalah sosial terutama masalah pembebasan lahan; keterbatasan dana untuk pembebasan lahan;
2. Berkurangnya debit pada sumber mata air;
3. Rendahnya peran masyarakat untuk memelihara fasilitas yang sudah ada.

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2019 agar mencapai hasil optimal :

- Perlunya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan fasilitas air minum; seperti lokasi pembangunan SPAM baik sumber air baku, bangunan mesin, jaringan pipa, hidran umum dan lain-lain;
- Perlu melakukan kajian yang mendasar mengenai pengelolaan SPAM yang melibatkan seluruh stakeholders dalam teknis perencanaan, pelaksanaan dan operasional agar pasca pembangunan SPAM dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- Alokasi dana yang cukup, terutama untuk pembebasan lahan



Persentase penduduk yang terlayani air minum bersih

Tahun 2018-2019

Sasaran5 : Berkurangnya resiko daya rusak air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) pada 12 kecamatan.

Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai menetapkan 1 (satu) kebijakan yang dijabarkan dalam 1 (satu) program dengan 1 (satu) indikator kinerja, seperti terlihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Target 2020
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Prosentase panjang DAS yang ternormalisasi	15	8,85	59	22,50	21,57	95,87	28

Pada tahun 2019 untuk indikator prosentase panjang DAS yang ternormalisasi ditetapkan target sebesar 22,50% atau sepanjang 800 m. Realisasi panjang DAS yang terbangun tahun 2019 767 m. Total penanganan sampai tahun 2019 1.341m.

Pada tahun 2018 untuk indikator prosentase panjang DAS yang ternormalisasi ditetapkan target sebesar 15% atau sepanjang 500 m / 9 lokasi. Realisasi panjang DAS yang terbangun sebesar 295 m. Apabila dikaitkan dengan target renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai dimana target pada tahun 2021 sebesar 28% sedangkan capaian sampai tahun ini 21, 57% maka target yang harus dicapai dua tahun ke depan sebesar 6,43%.

Total anggaran yang disiapkan untuk mencapai sasaran ini adalah Rp.927.756.798,00 dan realisasi Rp.925.556.798,00 (99,76%).

Sasaran 6 : Meningkatnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang

Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai menjabarkan dalam 2 (dua) program dengan anggaran Rp.1.340.607.800,00 dan realisasi Rp.1.248.936.224,00 (93,16%), dengan 1 (satu) indikator kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Target 2020
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1.	Prosentase kecamatan yang memiliki dokumen RDTR	58.33	41.67	71.43	91,67	41.67	45,45	95

Sebagaimana tahun 2018, capaian kinerja sasaran Prosentase kecamatan yang memiliki dokumen RDTR pada tahun 2019 juga merupakan capaian selama beberapa tahun terakhir yaitu dengan tersusunnya 5 dokumen RDTR yaitu RDTR kawasan strategis cancar dan Reo Kecamatan Ruteng dan Kecamatan Reok, RDTR kawasan strategis Kecamatan Langke Rembong, RDTR Kecamatan Satar Mese Barat, dan RDTR Kecamatan Reok Barat. Meski demikian pada tahun 2019 kegiatan yang telah dilakukan dinas sebagai jalan menuju tercapainya sasaran ini adalah dengan tersusunnya dokumen teknis Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Tahun 2012-2032. Dengan dilakukan Revisi perda RTRW, diharapkan pembangunan di wilayah kabupaten Manggarai mengedepankan keseimbangan, keselarasan dan keserasian penataan ruang. Memperhatikan aspek kelestarian lingkungan untuk kepentingan jangka panjang, bagi generasi mendatang. Koordinasi lintas sectoral juga menjadi upaya yang terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai terkait perlu adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Kajian Lingkungan Hidup Strategis dimaksud bukan saja untuk Perda RTRW namun juga untuk semua dokumen turunannya termasuk Dokumen RDTR.

Sasaran 7 : Meningkatnya pengendalian jasa konstruksi

Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai menetapkan 1 (satu) kebijakan yang dijabarkan dalam 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Target 2020
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya pengendalian jasa konstruksi	100	147,62	147,62	100	55,48	50,48	100

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pengendalian jasa konstruksi adalah 50,48% yaitu dari target yang

ditetapkan sebesar 100% (105 perusahaan), realisasi 50,48% (53 perusahaan) dengan tingkat capaian 50,48%. Ini berarti jumlah perusahaan yang mengajukan rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) pada tahun 2019 sebanyak 53 perusahaan sehingga diperoleh hasil 50,48% dengan rumus :

$$\frac{53}{105} \times 100\% = 50,48\%$$

Pada tahun 2018 prosentase pengendalian jasa konstruksi sebesar 147.62% (155 perusahaan) dari target yang ditetapkan 100% dengan tingkat capaian 147.62%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 yang mencapai 147% capaian 2019 lebih kecil. Hal ini disebabkan karena masa berlaku ijin usaha jasa konstruksi selama 3 tahun dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda untuk setiap perusahaan. Tahun 2019 ada 52 perusahaan yang melakukan perpanjangan ijin usaha dan 1 perusahaan yang mengusulkan IUJK baru.

Disamping sasaran strategis dinas PUPR, terdapat pula program dan kegiatan pendukung yang sangat berperan dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis dinas. Beberapa program kegiatan pendukung tersebut sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN PENDUKUNG :							
NO	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN KEUANGAN	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal	100%	961.817.500	953.123.485	99,10	99,94%	100
2	Terwujudnya Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur Yang Optimal	100%	847.167.000	698.687.441	0,00	100,00%	100,00
3	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	100%	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00%	100,00
4	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang optimal	100%	1.126.609.960	1.125.398.000	99,89	100,00%	100,00
	JUMLAH PROGRAM PENDUKUNG (4) DENGAN JUMLAH ANGGARAN		2.940.594.460	2.782.208.926	94,61	99,99	100

3.3 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2019, belanja langsung dan belanja tidak langsung adalah 94,79%.

Jumlah alokasi dana tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam DPPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor 915/B.Keu/1.03.1/X/2019 Tanggal 9 Oktober 2019 Tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 163.420.011.494,00 yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.869.719.233,- dengan realisasi Rp. 3.995.766.644,00 atau sebesar 82,05%;
- Belanja Langsung sebesar Rp. 158.550.292.261,00 dengan realisasi sebesar Rp.150.908.582.384,00,- atau sebesar 95,18%.

Rincian realisasi anggaran belanja langsung menurut sasaran program/kegiatan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Sasaran Strategis dan Realisasi Anggaran TA. 2019

No	SASARAN	INDIKATOR		PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN KEUANG AN
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya aksesibilitas jalan yang mendukung perekonomian dan pelayanan publik lainnya	1.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan:	75.113.435.642	69.823.896.152	92,96
		1.2	Panjang Jalan yang dilalui roda 4	Kegiatan Pembangunan jalan	75.058.785.017	69.770.428.652	92,95
				Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	54.650.625	53.467.500	97,84
		1.3	Peningkatan jenis konstruksi jalan	Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan:	15.727.940.750	15.100.878.015	96,01
			- Telford	Kegiatan Pemeliharaan jalan	15.688.378.250	15.061.315.515	96,00
			- Lapen	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	39.562.500	39.562.500	100,00
			- HRS (Hotmix)	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	5.843.374.500	5.657.444.625	96,82
				Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	5.780.182.000	5.605.452.125	96,98
				Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	63.192.500	51.992.500	82,28
		1.4	Jumlah Jembatan dalam kondisi baik	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan:	11.061.734.192	10.905.141.117	98,58
				Kegiatan Pembangunan Jembatan	11.043.517.317	10.887.141.117	98,58
				Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	18.216.875	18.000.000	98,81

No	SASARAN	INDIKATOR		PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN KEUANG AN
1	2	3		4	5	6	7
				Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan:	687.187.500	488.605.500	71,10
				Kegiatan Pemeliharaan Jembatan	674.000.000	475.418.000	70,54
				Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	13.187.500	13.187.500	100,00
2	Meningkatnya kualitas sanitasi (drainase) permukiman	2,1	Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	Program Pembangunan Saluran drainase/gorong- gorong :	8.002.284.000	7.943.473.900	99,27
				Kegiatan Pembangunan Saluran drainase/gorong- gorong	7.937.391.000	7.896.381.000	99,48
				Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	64.893.000	47.092.900	72,57
3	Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk pertanian rakyat	3,1	Rasio Jaringan Irigasi	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	15.820.267.484	15.654.392.475	98,95
		3,2	Prosentase Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi	15.264.519.884	15.108.534.875	98,98
				Penyusunan database irigasi	529.828.400	525.778.400	99,24
				Monitoring dan Evaluasi	25.919.200	20.079.200	77,47
4	Meningkatnya Jumlah Penduduk Yang Terlayani Air minum Bersih	4,1	Prosentase Jumlah penduduk yang terlayani dengan air minum bersih	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	18.333.763.535	17.885.823.654	97,56

No	SASARAN	INDIKATOR		PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN KEUANG AN
1	2	3		4	5	6	7
				Pembangunan jaringan air bersih/air minum	17.407.634.735	16.996.052.854	97,64
				Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum	887.250.000	859.652.000	96,89
				Monitoring dan Evaluasi	38.878.800	30.118.800	77,47
				1. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air baku	2.651.345.600	2.393.729.998	90,28
				Replikasi PAMSIMAS	2.150.190.000	1.915.580.000	89,09
				Pendamping PAMSIMAS	485.276.000	462.670.398	95,34
				Monitoring dan Evaluasi	15.879.600	15.479.600	97,48
5	Berkurangnya Resiko Daya Rusak Air Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) pada 12 kecamatan	5,1	Prosentase panjang DAS yang ternormalisasi	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	927.756.798	925.556.798	99,76
				Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	927.756.798	925.556.798	99,76
6	Meningkatnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	6,1	Prosentase kecamatan yang memiliki dokumen RDTR	Program Perencanaan Tata Ruang:	1.000.292.800	968.921.224	96,86
				Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW	44.960.000	44.830.300	99,71
				Revisi rencana tata ruang	884.032.800	856.124.924	96,84
				Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	21.500.000	19.666.000	91,47
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	49.800.000	48.300.000	96,99

No	SASARAN	INDIKATOR		PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN KEUANG AN
1	2	3		4	5	6	7
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	340.315.000	280.015.000	82,28
				Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	321.115.000	276.415.000	86,08
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	19.200.000	3.600.000	18,75
7	Meningkatnya pengendalian jasa konstruksi	7,2	Prosentase Jasa Konstruksi yang terawasi/Persentas e layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Program Pengaturan Jasa Konstruksi:	100.000.000	98.495.000	98,50
				Kegiatan Pengatuan dan penyelenggaraan jasa konstruksi	100.000.000	98.495.000	98,50
	J U M L A H				155.609.697.801	148.126.373.458	93,76
	PROGRAM/ KEGIATAN PENDUKUNG :						
		NO	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN KEUANG AN
		1	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	961.817.500	953.123.485	99,10
				Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	4.968.912	99,38
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	28.365.000	23.763.774	83,78
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	121.280.000	121.260.000	99,98
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	47.750.000	45.500.000	95,29
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.000.000	5.000.000	100,00

No	SASARAN	INDIKATOR		PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN KEUANG AN
1	2	3		4	5	6	7
				Penyediaan alat tulis kantor	109.442.500	109.442.000	100,00
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	120.000.000	119.999.800	100,00
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.000.000	4.000.000	100,00
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.800.000	3.360.000	70,00
				Penyediaan makanan dan minuman	90.480.000	90.129.000	99,61
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	425.700.000	425.699.999	100,00
		2	Terwujudnya Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur Yang Optimal	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	847.167.000	698.687.441	0,00
				Pengadaan mebeleur	99.888.000	99.888.000	100,00
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	581.310.000	433.350.441	74,55
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16.000.000	15.480.000	96,75
				Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	149.969.000	149.969.000	100,00
		3	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang Optimal	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	0,00
				Pendidikan dan pelatihan formal	-	-	0,00

No	SASARAN	INDIKATOR		PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	% CAPAIAN KEUANG AN
1	2	3		4	5	6	7
		4	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.000.000	5.000.000	100,00
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00
		5	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang optimal	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1.126.609.960	1.125.398.000	99,89
				Pengadaan alat-alat berat	922.759.960	922.148.000	0,00
				Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	203.850.000	203.250.000	
			JUMLAH PROGRAM PENDUKUNG (5) DENGAN JUMLAH ANGGARAN		2.940.594.460	2.782.208.926	94,61
			TOTAL PROGRAM (14) DAN ANGGARAN		158.550.292.261	150.908.582.384	95,18
*) Anggaran disesuaikan dengan Perubahan APBD 2019							

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2019
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
A	Pendapatan			
	Pendapatan Asli Daerah	1.305.000.000,-	426.508.336	32,68
	Total Pendapatan	1.305.000.000,-	426.508.336	32,68
B.	Belanja			
	1. Belanja Tidak Langsung:	4.869.719.233	3.995.766.644	82,05
	Belanja Pegawai	4.869.719.233	3.995.766.644	82,05
	2. Belanja Langsung:	158.550.292.261	150.908.582.384	95,18
	a. Belanja Pegawai	933.482.000	868.982.000	93,09
	b. Belanja Barang dan Jasa	7.249.479.000	6.582.887.848	90,80
	c. Belanja Modal	150.367.331.261	143.456.712.536	95,40
	Total Belanja	163.420.011.494	154.904.349.028	94,79
	Surplus/(Defisit)	150.482.074.048	150.482.074.048	

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 426.508.336,00 yang merupakan pendapatan yang berasal dari hasil retribusi daerah yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah bidang pekerjaan umum dan retribusi izin mendirikan bangunan. Jika dibandingkan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 sebesar Rp. 537.877.392,00,-, pendapatan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 26,11%.

Beberapa kendala yang mengakibatkan menurunnya realisasi pendapatan tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut :

- Beberapa alat berat sebagai sumber penerimaan mengalami kerusakan;
- Penggunaan alat berat lebih untuk mendukung kegiatan swakelola dinas dan kegiatan sosial.
- Belum maksimalnya kegiatan pendataan bangunan gedung dalam rangka mewujudkan tertib bangunan gedung yang salah satu kegiatan pendukungnya melalui penerbitan IMB.

2. Realisasi belanja per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp. 154.904.349.028,-** atau sebesar 94,79% yang terdiri dari:
- a. Belanja tidak langsung sebesar **Rp. 3.995.766.644,-** atau sebesar 82,05%;
 - b. Belanja langsung sebesar **Rp. 150.908.582.384** atau sebesar **95,18%**, dengan rincian:
 - Belanja pegawai Rp. 868.982.000,- (93,09%)
 - Belanja barang/jasa Rp. 6.582.887.848,- (90,80%)
 - Belanja modal Rp. 143.456.712.536,- (95,40%)

Tidak terserapnya anggaran dari rencana dikarenakan beberapa hal, antara lain:

- a. Adanya efisiensi berupa dana sisa lelang dari paket pekerjaan yang dikontrakkan;
- b. Adanya paket pekerjaan yang tidak terlaksana/gagal lelang;
- c. Adanya beberapa paket pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun 2019 sehingga pembayaran disesuaikan realisasi fisik pekerjaan.

Pada tahun 2019 terdapat 18 paket pekerjaan yang fisik pekerjaannya tidak dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa kontrak (fisik tidak mencapai 100%) dan merupakan paket *Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP)*. Tidak terselesaikannya paket-paket ini karena adanya kendala seperti 1).kondisi cuaca;2)kelalaian kontraktor pelaksana;3)ketersediaan alat dan material;4)perubahan desain pekerjaan dalam tahun berjalan.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai tahun 2019 adalah bentuk pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap Perjanjian Kinerja 2019 yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan sekaligus merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator kinerja terhadap 7 (tujuh) sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga dapat menjadi pedoman bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai pada tahun yang akan datang.

Secara umum hasil capaian indikator kinerja terhadap 7 (tujuh) sasaran strategis telah terlaksana dengan baik. Capaian dari masing-masing indikator sebagian besar di atas 90% walaupun masih terdapat beberapa capaian yang lebih kecil dari 50% bahkan terdapat satu indikator yang capaiannya merupakan capaian dari tahun sebelumnya.

Beberapa poin yang menjadi permasalahan dan perhatian penting pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2019 antara lain:

1. Terbatasnya anggaran yang ada, sehingga pelaksanaan kegiatan didasarkan pada skala prioritas;
2. Keterlambatan dalam proses perencanaan fisik yang berakibat pada masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang relative singkat;
3. Adanya beberapa paket pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu sehingga mengakibatkan penyerapan anggaran berkurang;
4. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang dapat diandalkan pada masing-masing bidang;
5. Masih kurangnya rekanan yang profesional di bidang konstruksi.
6. Kondisi geografis dapat juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk meningkatkan pencapaian kinerja kegiatan, maka hal-hal yang perlu diupayakan untuk tahun mendatang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Lebih memaksimalkan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada penyedia jasa untuk mendapatkan hasil kerja konstruksi yang bermutu dan tepat waktu;
2. Melaksanakan proses lelang lebih awal dan tepat waktu dengan melakukan koordinasi intens dengan pihak-pihak terkait;
3. Lebih fokus dalam pelaksanaan tugas
Seluruh jajaran dinas PUPR dalam penyelesaian tugas untuk fokus pada target-target yang telah ditetapkan baik secara nasional maupun target pemerintah daerah provinsi dan khususnya target pemerintah daerah kabupaten;
4. Meningkatkan intensitas forum diskusi antar bidang untuk lebih memahami tugas pokok dan fungsi, meningkatkan sinergitas program kegiatan antar sektor, peningkatan kualitas SDM, serta penyamaan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi pelaksanaan fisik serta realisasi keuangan;
5. Dalam merumuskan rencana anggaran perlu memperhatikan program/kegiatan prioritas, terutama yang telah tertuang dalam Indikator Kinerja Utama sehingga menjadi tolak ukur teknis pencapaian keberhasilan kegiatan pada tahun mendatang.
6. Mengalokasikan anggaran yang cukup dengan tetap memperhatikan skala prioritas;
7. Mengusulkan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan analisis kebutuhan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
8. Validitas data baik data perencanaan maupun data akhir sebagai bahan laporan dan evaluasi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai ini disampaikan untuk maklum dan urusan selanjutnya.

Ruteng, Januari 2019

